

TAJUK RENCANA

Sindiran Pak Lurah

KITA saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku, dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini, Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, Pak Lurah itu kode.

Begitu pengantar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI, Rabu (16/8). Sindiran Presiden Jokowi tersebut kemudian merebak di ranah publik. Kebanyakan media sosial lebih banyak sindiran tersebut kemudian marak dengan sindiran balik. Tentu saja, berbagai tanggapan yang muncul sangat ditentukan oleh siapa yang menanggapi, dari parpol dan dari koalisi mana.

Kalau kita cermati, 'tradisi' sindir-sindir (saling sindir) dari kalangan elit parpol sangat marak sejak Presiden Jokowi menyatakan tidak akan cawacaw terhadap capres dan cawapres dari parpol maupun koalisi parpol. Sindir-sindir makin marak setelah Presiden Jokowi menghadiri penetapan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP untuk Pemilu Presiden 2024.

Sindir-sindir yang menggejala selama ini dilandasi kepentingan masing-masing parpol atau koalisi parpol, serta para bakal calon presiden yang sudah muncul saat ini.

Perlu kita sayangkan, sindir-sindir selama ini sama sekali tidak punya esensi tentang

bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat di masa mendatang. Masalah rumput JIS saja dijadikan bahan sindir-sindir. Bahkan gerakan telapak tangan bersamaan pekik merdeka juga dijadikan bahan sindir-sindir: Telapak tangan yang benar mengepal atau membuka?

Saling sindir, adu pendapat, adu argumen dan adu prestasi, memang merupakan hal yang sangat lumrah bagi negara yang memberlakukan demokrasi. Bahkan di Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara demokrasi super maju juga tak luput dari 'sindir-sindir'. Lihat saja saling serang Presiden AS Joe Biden dengan mantan presiden Doland Trump.

Lebih ngeri lagi sindir-sindir yang dilakukan para jawara UFC, yang cenderung saling tantang adu kekuatan dengan cara brutal. Justin Gaethje sesumbar sebagai yang paling super setelah mengalahkan Dustin Pirier, 30 Juli lalu. Saling serang makin brutal ketika ditimpali Conor McGregor. Dalam budaya Jawa, sebenarnya juga ada cara untuk menyampaikan nilai-nilai luhur, pendapat, ajaran, wejangan dan tuntunan. Yakni dengan cara *medhang miring, ora ndumuk bathuk, nyamu-dana*, tidak vulgar dan tidak kasar.

Terlepas dari gejala sindir-sindir yang sekarang sedang marak, esensi dan roh peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 ini kiranya perlu dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Terlebih dalam menyambut tahun politik 2024.

Jangan sampai rakyat hanya dijadikan korban sindir-sindir antarelit politik. □-d

Memperjuangkan Kompensasi dari Belanda

Triyana Yohanes

BEBERAPA waktu lalu, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan Belanda tanpa keraguan mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pernyataan yang diberitakan media Juni 2023 tersebut mengubah sikap Pemerintah Belanda yang selama ini mengakui berdirinya Indonesia 27 Desember 1949. Sesuai waktu ditandatanganinya perjanjian pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.

Pengakuan Belanda tersebut membawa konsekuensi, perang yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia antara 1945 - 1949 (Perang Kemerdekaan) dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum internasional. Setelah berlakunya Piagam PBB, mulai 24 Oktober 1945, negara-negara dilarang menggunakan kekerasan senjata (perang) terhadap negara berdaulat lainnya. Juga dilarang menggunakan perang sebagai cara penyelesaian sengketa internasional. Berdasar Pasal 51 Piagam PBB, suatu negara hanya dibenarkan melakukan perang secara sah (*bellum justum*) dalam rangka membela diri.

Kompensasi

Mahkamah International Permanen dalam kasus *Chorzow Factory (Indemnity)* 1928 memutuskan, setiap pelanggaran terhadap kewajiban internasional membawa serta kewajiban membayar kompensasi (ganti rugi). Putusan tersebut menjadi dasar berlakunya doktrin *state responsibility* akibat adanya *international wrong*. Berdasar doktrin *state responsibility* negara yang melakukan kesalahan internasional wajib membayar kompensasi terhadap pihak yang dirugikan.

Dalam kasus pelanggaran hukum internasional selama Perang Kemerdekaan, Indonesia berhak menuntut ganti rugi atas segala kerugian yang diderita Indonesia. Indonesia dapat menuntut ganti rugi *immaterial (satisfaction)* dan ganti rugi *materiil (pecuniary reparation)*. Ganti rugi *immaterial* misalnya berupa pernyataan permintaan maaf. Sedangkan ganti rugi *materiil* berupa penggantian segala kerugian yang bisa dinilai dengan uang yang

timbul akibat perang kemerdekaan Indonesia tahun 1945 - 1949.

Ada berbagai cara yang bisa ditempuh Indonesia untuk menegakkan hak-haknya yang telah dilanggar Belanda tersebut, baik melalui cara diplomatik maupun secara hukum (*judicial*). Cara-cara diplomatik misalnya melalui perundingan (negosiasi), mediasi dan konsil-



Belanda, Rutte, mengisyaratkan akan melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk mencari jalan ke luar bersama Presiden Indonesia, Joko Widodo (<https://www.bbc.com>, 15/6). Karena itu, upaya diplomatik, khususnya melalui negosiasi (perundingan) Indonesia - Belanda seyogyanya diutamakan dalam memperjuangkan hak-hak Indonesia akibat pelanggaran hukum internasional selama Perang kemerdekaan.

Landasan Moral

Jika perundingan Indonesia - Belanda dalam masalah tersebut berhasil baik tanpa merusak hubungan kedua negara, kita berharap bahwa pemerintah Belanda juga akan sedapat mungkin memberi kompensasi. Bukan hanya untuk kerugian yang diderita Indonesia selama Perang Kemerdekaan, tetapi juga kompensasi atas hak-hak Indonesia yang telah dilanggar pada masa kolonial. Salah satu prinsip *the New International Economic Order* sebagaimana tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1974 adalah tentang kompensasi sumber-sumber alam yang dieksploitasi di zaman penjajahan.

Meskipun Resolusi Majelis Umum PBB tersebut sifatnya lebih merupakan *international soft law norms*, paling tidak prinsip tersebut telah meletakkan landasan moral tentang kewajiban negara-negara bekas penjajah untuk memberi kompensasi kepada negara bekas jajahannya atas kekayaan dan hak-hak yang telah dirampas di masa kolonial. □-d

***) Dr Triyana Yohanes SH Mhum,**
Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Noktah Hitam di Yogya

MIRIS. Membaca dan melihat berita di media massa tentang Yogya. Ada kasus korupsi mantan Walikota Yogyakarta. Ada kasus tanah kas desa (TKD) yang menyeret pejabatnya. Dan masih ada kasus lain yang membuat noktah hitam di Yogya.

Kadangkala, sebagai *kawula* Yogyakarta generasi ketiga, bangga terkenang masa lampau negeri yang *tata tentrem kerta raharja*. Maka mendengar, membaca dan melihat berita dengan kasus di atas, rasanya sangat malu dan merupakan peristiwa mema-

lukan di Yogya. Sebagai wahlikota ia adalah juga pemangku pangreh praja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin Sri Sultan Hamengku Buwono X. Mestinya, wajib menjaga warah kesultanan.

Saya masih ingat dalam seminar & lokakarya nasional dengan tema 'Merintis Pega-wai Negeri yang Bersih Suap' di Hotel Sheraton Mustika Ratu (24/1/2004) Sri Sultan bersabda : *moral principles is the foundation of law* □-d

***) FS Hartono, Purwosari 004/059 Sinduadi Sleman**

Penipuan Lewat Handphone Makin Merajalela

HANDPHONE (HP) sudah merupakan kebutuhan pokok. Bukan untuk gaya, tapi untuk sekolah anak pun diperlukan. Bahkan tidak lagi bisa yang sederhana. Meski tidak lagi pandemic, kadangkala tugas sekolah juga diberikan lewat HP dan WhatsApp Group (WAG). Tapi seiring itu juga menjadi re-

pot pula karena banyaknya penipuan lewat aplikasi dan SMS untuk pinjol bahkan ajakan kencana dan lainnya.

Mau bertanya, kalau nomer kami mendapat kiriman-kiriman tersebut, siapa yang bertanggung jawab? □-d

***) Eko W, Manyaran Wonogiri**

KR, Selalu Menebar Manfaat

TERIMAKASIH Para Pembaca KR: *Jadi Oase Palu, Sigi dan Donggala*. Demikian judul Liputan Khusus yang ditayangkan harian tercinta ini pada Sabtu (12/8).Kabar yang menyejukkan di saat kita diterpa berbagai warta melelahkan batin belakangan.

Betapa tidak? Peresmian 10 masjid di Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) yang merupakan bantuan pembaca KR telah menjadi oase yang menyegarkan bagi masyarakat setempat. Belum lagi penulis kutip lengkap dalam berita tersebut bantuan sembako saat masa tanggap darurat, pembuatan 4 sumur suntik, pembangunan 12 hunian sementara, 25 mesin perahu dan 20 perahu sebagai alat kerja nelayan.

Bahkan tidak cukup di situ, bantuan lain masih ada berupa 2 unit genset, 5 unit pompa air, 1 unit kompresor, pemberian paket makanan tambahan anak-anak PAUD, pemberian beasiswa, serta 3 unit motor niaga untuk berjualan sayur mayur.

Aksi Kemanusiaan

Jujur, trenyuh hati ini membaca aksi kemanusiaan yang dilakukan KR, termasuk jajaran dewan direksi berikut seluruh donatur pembaca. Sebab secara kalkulasi bisnis, apa yang telah dilakukan KR sama sekali tidak menguntungkan. Masyarakat Pasigala sangat bersyukur karena bantuan itu datang dari pembaca KR. Bukan pula untuk ekspansi pangsa pasar KR.

Namun hidup ini tidak selalu melulu persoalan nominal untung rugi bisnis. Hidup ini adalah berbuat baik kepada sesama tanpa mengharap imbalan. Berbuat baik, terus melakukannya tanpa henti hingga jatah hidup di dunia selesai.

Kredo *Migunani Tumraping Liyan* menjadi ruh perjuangan yang selalu

Bramma Aji Putra

dihidupkan hingga generasi masa kini. Sembongan yang dalam Islam berbunyi *khairunnas anfa'uhum linnas* (sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain). Inilah esensi ketekwaan sebenarnya.

Takwa, dan iman tentu saja, bukan sekadar bilangan berapa banyak kita beribadah. Namun bagaimana perwujudan ibadah sosial kita membantu orang-orang yang membutuhkan.

Secara pribadi penulis mengenal Direktur Utama KR HM Wirmon Samawi yang cukup aktif dalam suatu majelis pengajian dan doa. Aura positif itulah yang saat ini menjadi motor penggerak KR untuk terus menebar manfaat tanpa henti.

Melihat orkestra kemanusiaan yang telah dilakukan KR tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan KR itu sendiri. Harian yang bulan depan usia Indonesia ini sejak lahir telah berjasa bagi Republik. KR lahir pada saat tepat, memperkuat eksistensi Indonesia yang saat itu baru seumur jagung.

Kini perjuangan telah berubah. Kalau dulu duet wartawan *cum* pejuang Samawi dan Wonohito adalah mendirikan KR. Generasi saat ini dituntut mempertahankan di zaman digital dan *borderless*. Harus diakui KR menjadi salah satu media massa lokal yang masih bertahan di era gempuran media berjejaring dan online yang kadang menyajikan berita asal bombastis belaka.

Berita Sejuk

Kebermanfaatan KR akan terus dirasakan dengan menebar berita sejuk disertai akurasi tinggi. Hanya saja, media salurannya yang berubah. Pada saat ini mungkin KR dapat memperkuat media sosial yang dimiliki. Ibarat kata bestari Jawa *ngeli ning ora keli*.

Kita dapat melihat, misalnya, akun Instagram [@krojogadotcom](https://www.instagram.com/krojogadotcom) misalnya, per 12/8/2023 memiliki pengikut sekitar 27 ribu. Ini merupakan modal yang sangat berharga untuk terus membangun kepercayaan publik. Dan KR memiliki modal lain yang tidak dimiliki media lainnya. Modal yang tidak dapat ditukar rupiah berapapun. Modal itu ialah *trust* alias kepercayaan. Modal inilah yang harus senantiasa dijaga, agar tetap eksis hingga nanti. □-d

***) H Bramma Aji Putra SKomI MM,** Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY

Pojok KR

Presiden Jokowi mengingatkan, banyak cobaan dan tantangan yang dihadapi Indonesia.

-- Juga tantangan 2024.

DPRD DIY sepatok maksimalkan serapan Danais untuk mengentaskan kemiskinan.

-- Setujuuuu!

Pemda DIY membuka pendaftaran untuk 1.042 lowongan CASN PPPK.

-- Bisa dimanfaatkan.

Beraba

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tang-gungjawab percetakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krojogia.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaidi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banjumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP